

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menganalisis bagaimana pekerja kantoran menggunakan *second account* Instagram sebagai strategi sadar untuk mengelola privasi dan melakukan *self disclosure* di tengah kaburnya batas antara kehidupan pribadi dan profesional di media sosial. Berdasarkan teori *Communication Privacy Management* (CPM) oleh Sandra Petronio, penelitian ini menemukan bahwa *second account* berfungsi sebagai ruang digital alternatif yang memungkinkan pengguna mempertahankan kontrol atas informasi pribadi secara selektif dan kontekstual. Berdasarkan hasil analisis terhadap lima partisipan, ketiga pertanyaan penelitian terjawab melalui temuan berikut:

1. Penggunaan *Second Account* Instagram untuk Mengontrol Informasi Pribadi dan Menetapkan Batasan Privasi

Pekerja kantoran memanfaatkan *second account* untuk mengontrol informasi pribadi dan menetapkan batasan privasi. Informasi yang dibagikan umumnya bersifat intim, emosional, atau sensitif, seperti curhatan, keresahan terhadap pekerjaan, pendapat pribadi, hingga momen keseharian yang dinilai kurang pantas dibagikan melalui *first account* karena pertimbangan citra profesional. Praktik ini mencerminkan konsep *private information* dalam teori CPM, di mana individu secara sadar membatasi distribusi informasi hanya kepada kelompok tertentu. Pengelolaan siapa yang dapat mengikuti *second account* merupakan bentuk dari *privacy control*, yang dilakukan melalui penyaringan *followers* dan penghapusan akses terhadap pihak-pihak yang dianggap berisiko. Sementara itu, penentuan siapa yang berhak mengakses informasi mencerminkan penerapan *privacy boundaries* yang dikonstruksi berdasarkan relasi interpersonal, tingkat kepercayaan, dan konteks sosial. Dalam hal ini, *second account* menjadi representasi konkret dari pemisahan antara ruang personal dan profesional, serta berfungsi sebagai ruang digital yang dirasa

lebih aman secara sosial dan menegaskan peran individu sebagai *privacy managers* dalam praktik pengelolaan privasi di media sosial.

2. Penetapan Aturan Privasi dan Respons terhadap *Privacy Turbulence*

Partisipan menetapkan aturan privasi yang bersifat situasional dan fleksibel, sebagaimana dijelaskan dalam konsep *rule-based management system*. Mereka menyesuaikan batasan berbagi berdasarkan pengalaman sebelumnya, perubahan hubungan sosial, dan konteks keseharian. Namun, pengelolaan ini tidak selalu berjalan mulus. Seluruh partisipan mengalami *privacy turbulence*, yakni situasi ketika informasi yang dibagikan secara terbatas ternyata tersebar ke lingkungan yang tidak diinginkan. Dalam beberapa kasus, hal ini berujung pada teguran dari HR, konfrontasi dari rekan kerja, hingga ketegangan relasional seperti perang dingin di lingkungan kantor. Tidak hanya berdampak formal tetapi juga psikologis mencakup rasa malu atau tidak nyaman, tekanan sosial, dan kekhawatiran terhadap reputasi profesional. Respons terhadap kondisi ini mencakup tindakan merefleksikan kembali batas kontrol mereka, memperketat seleksi *followers*, serta mengurangi intensitas *self disclosure*. Salah satu strategi yang muncul adalah beralih ke fitur *Close Friends* saat membagikan konten sensitif seperti opini atau pengalaman kerja, sebagai bentuk kontrol privasi yang lebih terarah dan selektif. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa pengelolaan privasi digital bersifat dinamis dan penuh negosiasi, serta memerlukan adaptasi berkelanjutan terhadap risiko sosial di media sosial.

3. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan dalam Melakukan *Self Disclosure* melalui *Second Account* Instagram

Keputusan untuk melakukan *self disclosure* dipengaruhi oleh dinamika antara kebutuhan keterbukaan (*openness*) dan keinginan untuk melindungi diri dengan menjaga privasi (*closedness*) baik secara psikologis dan sosial, yang dijelaskan dalam *privacy management dialectics*. Faktor internal seperti dorongan emosional, kebutuhan untuk merasa terhubung, berekspresi otentik yang bebas dan kenyamanan berbagi, bersinggungan dengan faktor eksternal

seperti norma profesional, tekanan pencitraan, risiko reputasi, serta pengalaman sebelumnya dalam berbagi yang memicu penyesalan. Individu secara aktif menegosiasikan strategi berbagi dengan menimbang manfaat emosional dan potensi kerugiannya. Kesadaran akan konsekuensi jangka panjang menyebabkan *self disclosure* dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara koneksi sosial dan perlindungan identitas diri di ruang digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *second account* Instagram oleh pekerja kantoran merupakan strategi komunikasi yang kompleks untuk mempertahankan kendali atas identitas pribadi dan profesional di era keterhubungan digital. *Second account* berperan penting dalam memisahkan kehidupan personal dan profesional, sekaligus menjadi ruang yang dirasa lebih aman untuk mengekspresikan diri secara emosional tanpa beban pencitraan. Temuan ini menegaskan bahwa ruang digital memiliki batasan privasi yang perlu dikelola secara sadar oleh setiap individu, khususnya pekerja kantoran yang menghadapi tuntutan profesionalisme dan ekspektasi sosial di media sosial.

Selain menjadi kontribusi praktis, penelitian ini juga memberikan refleksi kritis terhadap pentingnya perlindungan data pribadi di era digital, yang kini mulai diperhatikan secara hukum dan institusional. Informasi sensitif yang dibagikan melalui *second account* menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat tentang pemisahan ruang digital personal dan profesional. Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dengan mengkaji praktik pengelolaan privasi menggunakan teori *Communication Privacy Management* dalam konteks pekerja kantoran, yakni kelompok yang selama ini belum banyak dijadikan fokus studi. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis teori yang relevan, penelitian ini menghadirkan gambaran yang kaya tentang dinamika manajemen privasi digital di kalangan profesional muda.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini disusun sebagai bentuk refleksi atas keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian serta sebagai rekomendasi bagi pengembangan studi lebih lanjut dan penerapan praktis dari temuan yang diperoleh. Saran ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu saran akademis dan saran praktis.

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *Communication Privacy Management* (CPM) dalam konteks media sosial, khususnya pada fenomena penggunaan *second account* Instagram oleh pekerja kantor. Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada lima partisipan dari kelompok usia tertentu dan konteks kerja di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk:

- Mengkaji variasi konteks budaya dan organisasi, seperti perusahaan dengan kultur kerja yang lebih beragam, misalnya konservatif versus progresif, untuk melihat bagaimana budaya mempengaruhi batas privasi digital.
- Menjelajahi aspek gender, usia, atau jabatan yang lebih luas untuk membandingkan bagaimana strategi manajemen privasi dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, posisi kerja atau kelompok usia antara pekerja junior dan senior.
- Mengintegrasikan teori lain sebagai pendekatan komplementer, seperti *Impression Management*, *Digital Identity*, atau *Media Multiplexity* untuk memperkaya analisis terhadap terkait pembentukan interaksi identitas personal dan profesional serta pengelolaan privasi di ruang digital.
- Mengingat sifat pribadi dan sensitif dari akun kedua, pendekatan *participant-centered* atau *participatory research* dapat menjadi alternatif yang etis dan efektif untuk membangun kepercayaan partisipan serta memperdalam kualitas data yang dikumpulkan.

Dengan memperluas fokus partisipan, konteks organisasi, serta pendekatan teoritis dan metodologis, studi mendatang berpotensi memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik mengenai dinamika privasi dan *self disclosure* pekerja kantoran dalam lanskap media sosial yang terus berkembang.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat sejumlah saran yang dapat diterapkan secara praktis oleh individu, perusahaan, maupun pembuat kebijakan:

- Bagi pekerja kantoran, penting untuk meningkatkan kesadaran literasi digital dan etika privasi, terutama dalam membedakan ruang publik, privat, dan semi-privat di media sosial. Penggunaan second account harus dibarengi dengan pemahaman tentang risiko *privacy turbulence* akibat penyebaran informasi tanpa izin dan kontrol.
- Bagi perusahaan diharapkan mulai merumuskan kebijakan komunikasi digital internal yang jelas dan adil, tidak sekedar membatasi, tetapi juga mendukung keseimbangan antara ekspresi diri dan profesionalisme karyawan. Kebijakan ini mencakup edukasi tentang perlindungan data pribadi di lingkungan kerja, panduan etika bermedia sosial, pelatihan tentang privasi digital, serta penyediaan ruang atau forum internal yang aman untuk menyalurkan ekspresi maupun aspirasi karyawan.
- Bagi pemerintah dan lembaga terkait, meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan di Indonesia, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemahaman masyarakat dan penerapan oleh institusi. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat pelaksanaan regulasi ini melalui sosialisasi intensif, pengawasan yang lebih ketat terhadap pelanggaran privasi digital, serta penyediaan saluran

pengaduan yang mudah diakses. Selain itu, penting untuk mengembangkan program literasi digital yang menasar para pekerja agar mereka memahami hak-hak privasi mereka, risiko penggunaan media sosial, serta cara menjaga keamanan data pribadi di ruang daring.

- Bagi masyarakat umum, sebagai pengguna aktif media sosial diharapkan mulai membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga batas privasi digital. Hal ini termasuk menghormati keputusan orang lain untuk membatasi akses informasi melalui *second account*, serta tidak menyebarkan konten pribadi tanpa izin. Edukasi informal melalui komunitas digital, forum daring, atau *influencer* yang mempromosikan etika berbagi dapat menjadi bagian dari upaya ini.

Dengan menerapkan langkah-langkah praktis tersebut, diharapkan individu, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dapat bersama-sama membentuk ekosistem digital yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab, yakni ekosistem yang menghargai batas privasi, menjunjung etika komunikasi, dan mendukung kesejahteraan psikososial, khususnya dalam dinamika penggunaan media sosial oleh para pekerja kantor.

